BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis akan membahas mengenai Pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi sembilan sub bab, antara lain sebagai berikut: Alasan penulisan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penulisan, metode penulisan, jangkauan penulisan dan sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Alasan Pemilihan Judul

Menjadi hal yang menarik ketika arah kebijakan pertahanan Amerika Serikat telah mengalami perubahan, salah satunya pernyataan ketegasan sikapnya untuk berfokus di kawasan Asia Pasifik. Banyak kalangan yang menganggap kehadiran Amerika Serikat secara intens di Asia Pasifik dengan menempatkan pasukan militer di Darwin, Australia berkaitan dengan sikap AS terhadap Indonesia, khusunya masalah Papua.

Ketegangan di tanah Papua yang berkepanjangan dan belum menemukan titik penyelesaian sampai saat ini. Selain itu banyak pihak yang menganggap Indonesia telah melakukan tindakan pelanggaran HAM berat dalam masalah Papua yang dapat dijadikan tekanan oleh Negara lain bagi Indonesia. Penulis sendiri yang merupakan warga Negara Indonesia menganggap pentingnya untuk bersikap kritis terhadap hal yang dapat menganggu Integritas bangsa Indonesia. Disamping itu ketersediaan data dari berbagai sumber yang dirasa telah cukup

untuk dapat menyelesaikan penelitian ini sehingga penulis tertarik untuk mengangkat dan memaparkan judul tentang ***Ancaman Pembangunan Pangkalan Militer Amerika Serikat Di Darwin Terhadap Kedaulatan Indonesia*** dalam skripsi ini.

B. Latar Belakang Masalah

Integrasi adalah proses mempersatukan masyarakat, yang cenderung membuat masyarakat menjadi lebih baik atau harmonis. Sedangkan pada hakikatnya Integrasi nasional merupakan proses penyatuan unsur-unsur nasional agar tercapai suatu kesatuan nasional yang serasi dan harmonis bagi suatu negara. Proses integrasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dalam waktu yang cukup lama. Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang mengalami proses panjang dalam melakukan integrasi nasional.[1]

Wilayah Indonesia yang merupakan wilayah yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki pulau sebanyak sekitar 13.000 pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Dahulu wilayah Indonesia adalah merupakan bekas kumpulan wilayah di bawah pemerintah kolonial Belanda yang dulunya bernama Hindia-Belanda. Sejarah terbentuknya wilayah-wilayah ini kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Faktor pendorong terjadinya integrasi nasional pada masa kolonial diawali oleh adanya faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan

---

[1]. Saafroedin Bahar dan A.B.Tangdililing (ed.). Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi. Hal. 14

dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Keruntuhan negara kolonial Hindia Belanda pada Perang Dunia II (1942) oleh serbuan Jepang, dan pendudukan Hindia Belanda oleh Jepang merubah seluruh struktur politik di Hindia Belanda. Nama Indonesia secara resmi dipakai menggantikan nama wilayah Hindia Belanda.[2] Meskipun di bawah kekuasaan Jepang indonesia kembali dijajah, namun proses integrasi bangsa justru mencapai tonggak yang sangat penting, karena ikrar Sumpah Pemuda (satu nusa, satu bangsa, satu bahasa) secara faktual diakui oleh pemerintah militer Jepang.

Hingga berakhirnya Perang Dunia II dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu merupakan kesempatan emas bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri, bebas dari kekuasaan penjajah siapa pun. Momentum untuk menyatakan kemerdekaan kepada dunia diraih pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika terjadi *vacum of legitimate power*, karena Jepang yang kalah tidak lagi sah memerintah, dan Sekutu yang menang belum lagi datang ke Indonesia. Hingga inilah awal terbentuknya NKRI sebagai negara yang merdeka bebas dari penjajahan.[3]

Namun dalam perjalananya proses integrasi Indonesia sebagai sebuah negara yang telah merdeka tidak selalu berjalan dengan mulus, Integrasi nasional bangsa Indonesia terus menerus diuji. Didalam proses menuju Integrasi nasional untuk menciptakan suasana yang harmonis serta damai Indonesia sering dihadapkan pada situasi yang menjadi tantangan terhadap integrasi di Indonesia.

---

[2] Djuliati Suroyo, INTEGRASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA SEBUAH PROSES YANG BELUM SELESAI, Hal. 11

[3] Ibid

Bahkan Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit yang disebakan lepasnya salah satu wilayah dari Indonesia yaitu Timor-Timur ketika terjadi Konflik. Konflik ini bermula dari dikeluarkanya UU no.7 tahun 1976 oleh Presiden Soeharto yang Isi dari UU tersebut adalah pengesahan Timor Timur sebagai bagian dari NKRI dan dibentuknya pemerintah daerah tingkat 1 di Timor Timur. Dengan ini menempatkan Timor Timur sebagai propinsi Indonesia yang ke 27. Hal ini ditentang oleh penduduk asli Timor Timur yang dijajah oleh Portugis yang jelas-jelas berbeda dengan penjajahan Belanda di bagian lain Indonesia. Sebagian dari mereka mengangkat senjata dan mengorganisir perlawan dibawah kepemimpinan Xanana Gusmao dan Fretilin. Itulah awal dari gerakan separatis oleh para "freedom fighter" dari Timor Timur. Selama integrasi Indonesia dengan Timor Timur, telah terjadi banyak sekali pertempuran dan juga tindak kekerasan, baik itu antara kekuatan pro integrasi dan pro kemerdekaan serta Juga kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer Indonesia selama operasi militer.[4]

Mengakibatkan pada saat itu Indonesia di bawah Presiden Soeharto, Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran HAM berat dalam penyelesaian Timor Timur. Sehingga hal tersebut mendorong adanya intervensi dari pihak luar untuk mendesak Indonesia melepaskan timor Timur. Khususnya Portugal, Australia, serta Amerika Serikat adalah Negara yang memberi perhatian besar terhadap masalah Timor Timur yang hal tersebut tidak terlepas dari kepetingan nasional mereka. Terbukti dengan berbagai desakan kepada Indonesia pada tahun

---

[4] Monika Schlicher, Timor Timur menghadapi masa lalunya Kerja Komisi Penerimaan,Kebenaran dan Rekonsiliasi, Hal. 3

1998 ketika Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie diadakan jajak pendapat yang pada akhirnya Indonesia mengalami kekalahan sehingga harus melepaskan Timur Timor dari wilayah NKRI.

Selanjutnya juga terdapat konflik lain dalam proses integrasi nasional Indonesia , yaitu konflik di Papua yang merupakan konflik yang berkepanjangan bahkan sampai saat ini masih tetap mengalami gejolak yang belum menemukan titik penyelesaian yang efektif. Dalam konflik ini dilatar belakangi setelah secara resmi Papua yang dulu bernama Irian Barat bergabung dengan wilayah Indonesia di bawah resolusi PBB No. 2504 [5].

Namun sejak Papua resmi menjadi bagian dari kesatuan NKRI, sebagian penduduk Papua merasa kurang puas karena pada kenyataanya mereka masih terpinggirkan dan miskin. Wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpahkan seharusnya akan mampu membuat rakyatnya hidup sejahtera dengan apa yang Papua miliki. Namun pada kenyataannya wilayah Papua tetap menjadi wilayah Indonesia yang termiskin dengan kesejahteraan yang belum bisa merata didapatkan oleh masyrakat Papua.

Ketidakpuasan dalam hal ekonomis inilah, yang memunculkan semangat separatisme dari penduduk pribumi Papua . Pemerintah Pusat yang dinilai gagal dalam membangun kesejahteraan di Papua, apalagi dengan diadakannya Operasi Militer oleh Pemerintah Pusat untuk mengatasi pemberontakan separatisme di

---

[5] Yan Pieter Rumbiak, *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Menyelesaikan Pelanggaran HakAsasi Manusia dan Membangun Nasionalisme Di Daerah Krisis Integrasi*, (Jakarta, Papua International Education, 2005), hal.36. (M. Fathoni Hakim, Papu, Isu Separatisme dan Keterlibatan Australia , hal. 44).

Papua yang dalam faktanya justru banyak menimbulkan pelanggaran HAM. Hal ini memperkuat rakyat Papua berkeinginan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Selain diatas , separatisme di Papua juga disebabkan oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, peminggiran sosial budaya, nasionalisme Papua dan diskriminasi politik dan hukum. Dalam perspektif ini , diindikasikan bahwa adanya tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua dalam Pepera (penentuan Pendapat Rakyat) yang menghasilkan bergabungnya Papua dengan Indonesia[6].

Sampai sekarang konflik yang terjadi di Papua masih berlanjut dengan intensitas gejolak yang semakin beragam. Kembali terjadi tudingan pihak asing kepada Indonesia mengenai tindakan pelnggaran HAM yang dilakukan dalam penyelesaian konflik di Papua terhadap gerakan separatisme. Amerika Serikat Dan Australia adalah dua negara yang juga memberikan perhatianya kepada Papua, keduanya menganggap Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat di Papua.

Selain konflik yang terjadi di atas, masih terdapat banyak konflik dalam perjalanan proses integrasi nasional yang merupakan tantangan bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan serta kedamaian negaranya, diantaranya adalah konflik di Aceh, Maluku utara, Sampit (kalimantan tengah) serta lainya. Dari konflik yang telah disebutkan terlihat dalam sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia

---

[6]. Tuhana Taufiq Andrianto, *Mengapa Papua Bergolak*, Yogyakarta, 2001, h.151(M.Fathoni Hakim, Perjanjian Keamanan Indonesia dan Australia terkait masalah Papua , hal. 2)

masih terjadi tantangan-tantangan yang harus dihadapi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan integrasi nasional di Indonesia.

Guna menghadapi tuntutan tantangan dalam proses integrasi nasional, Indonesia menerapkan sistem pertahanan negara yang pada hakikatnya memiliki tujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri berdasarkan Pasal 16 Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.[7]

Bagi Indonesia, penyelenggaraan pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional. Pertahanan yang efektif adalah pertahanan yang mampu menghadirkan suasana aman dan damai di mana kehidupan masyarakat berjalan secara normal, dan hubungan dengan sesama negara baik di kawasan maupun di luar kawasan berlangsung secara harmonis dan saling menghargai.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nirmiliter. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh TNI meliputi operasi militer perang dan operasi militer selain

---

7. Departemen Pertahanan RI, Buku Putih Tahun 2008, Hal. 60-63

perang. Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil.[8]

Segala sesuatu yang dapat membahayakan pertahanan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa adalah merupakan ancaman. Dalam menghadapi masalah ketahanan nasional suatu negara, permasalahan ketahanan nasional yang dihadapi diantaranya berasal dari dua sumber ancaman , yaitu dalam negeri dan luar negeri.

Kasus permasalahan ancaman ketahanan nasional dari dalam negeri yaitu adanya pemberontakan dari berbagai daerah, dan kudeta yang dilakukan oleh kelompok sipil dan militer. Sedangkan ancaman dari luar yaitu adanya unsur-unsur campur tangan pihak lain dalam menguasai maupun menggangu kedaulatan negara, seperti tindakan intervensi asing, invasi militer dari negara lain dan penguasaan terhadap ekonomi, politik, dan budaya oleh negara lain.

Amerika Serikat dan Australia adalah dua negara yang telah menjalin kerjasama militer sejak lama, sejak kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II memperlihatkan bagaimana pentingnya peran Amerika Serikat sebagai pengawal pertahanan Australia. Pada saat itu Amerika Serikat mampu menyelamatkan Australia dari serangan Jepang pada perang pasifik.

Disamping itu perang dingin yang muncul antara Blok Barat (Amerika Serikat) dengan Blok Timur (Uni Soviet) membuat Australia semakin mengukuhkan sekaligus mengikatkan diri sebagai sekutu dari Amerika Serikat. Dalam politik luar negerinya, pemerintah Australia melancarkan kebijakan

---

[8]. Ibid

antikomunis melalui keikutsertaanya dalam Politik Pembendungan *(Containment Policy)* yang dijalankan oleh Amerika Serikat. Sebagai usaha pembendungan komunis dalam militer dan menjamin stabilitas kemanan regional di Asia Pasifik.

Sehingga dibentuklah pakta pertahanan ANZUS (Australia New Zealand United States) yang merupakan bukti dari peningkatan hubungan militer kedua Negara yang dibentuk pada 1 September 1951 di San Fransico. Hal tersebut dilakukan demi kepentingan politik dan perdamaian dan dalam rangka membendung pengaruh komunis di wilayah Asia Pasifik terutama di kawasan Asia Tenggara. Hubungan kedua negara tetap berlanjut hingga saat ini, berbagai kerjasama keamanan strategis diantara keduanya telah dihasilkan. Di akhir tahun 2011 yang juga diperingati sebagai 60 tahun ANZUS telah dipersiapkan bebagai agenda oleh kedua negara tersebut .

Diantaranya pada November 2011 Presiden Amerika Serikat Barack Obama beserta Perdana Menteri Australia Julia Gillard mengumumkan akan meningkatkan kerjasama militer yang telah terjalin sejak lama . Salah satu agenda peningkatan kerjasama militer antara Amerika Serikat dan Australia adalah peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat secara inten di Australia. Keduanya sepakat akan dibangun pangkalan militer angkatan laut di Darwin, Utara Australia.[9] Rencananya Amerika Serikat akan mengirimkan 2.500 pasukannya untuk mengisi pangkalan perang tersebut. Pada April 2012, Amerika

---

[9]. Russia Today, *2500 US Marines in Darwin 'Not a Military Base' (online)*, 2012, <http://rt.com/news/usaaustralia- darwin-china-185/>, diakses 15 September 2012;

Serikat telah mulai mengirim pasukannya sejumlah 200 yang pada nantinya pasukan Amerika Serikat di Darwin, akan mencapai 2.500 personil pasukan.

Bagi Amerika serikat , kehadiran militer di Darwin tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kerjasama militer dengan Autralia yang telah terjalin sejak lama dengan mengadakan pelatihan militer bersama secara rutin di Darwin. Pengiriman pasukan Amerika Serikat ke Darwin sebenarnya bukan merupakan hal yang tiba-tiba, tetapi sejak tahun 1970-an, Darwin Australia merupakan basis intelejen Amerika Serikat untuk wilayah Asia Pasifik.[10]

Selain itu, pada kenyataan saat ini ketakutan Amerika Serikat pada kebangkitan RRC yang menunjukan secara ekonomi dan militer semakin menguat yang dihawatirkan akan mengganggu kepentinganya di wilayah Asia Pasifik dan ASEAN yang merupakan mitra terpenting AS setelah krisis Uni Eropa. Pasukan Amerika Serikat yang telah mendapat penolakan dari masyarakat di Jepang dan Korea Selatan. Dengan maraknya kasus pemerkosaan oleh tentara AS di Jepang dan Korea, serta konflik horizontal yang sering terjadi, maka akan dipastikan untuk jangka panjang AS akan merelokasi pasukannya dari kedua negara tersebut ke Darwin .[11]

Namun tidak hanya sampai disini, tindakan penempatan pasukan militer Amerika Serikat tersebut tentunya menimbulkan berbagai ancaman bagi negara tetangga di sekitar Darwin. Wilayah Indonesia yang terbentang luas dari Sabang

---

[10]. The Age, *Obama to announce US marine base in Darwin (online),* 2011, <http://www.theage.com.au/national/obama-to-announce-us-marine-base-in-darwin-20111110 1n9rf.html>, diakses 15 september 2012.

[11]. The Wall Street Journal, *U.S. to Build Up Military in Australia (online),* 2011, <http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203537304577028490161890480.html>, diakses 17 Septemberl 2012

sampai Merauke yang merupakan salah satu negara yang memiliki kedekatan wilayah dengan Darwin, khususnya adalah pulau Papua. Darwin hanya berjarak sekitar 820 kilo meter ke wilayah Papua menjadi suatu ancaman tersendiri bagi kedaulatan Indonesia dibanding dengan wilayah tetangganya seperti, Filipina, Vietnam.[12]

Wilayah Papua yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah di dalamnya serta terdapat banyak konflik yang terjadi diwilayah Papua, dengan adanya gerakan separatisme Papua yang sejak lama ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dengan banyaknya aksi separatisme yang dilakukan di Papua menjadi salah satu alasan AS mendirikan pangkalan militernya di Darwin mengingat bahwa Amerika serikat dan Australia adalah negara yang sudah lama memberikan perhatian terkait masalah di Papua bahkan ada indikasi mendukung perjuangan kemerdekaan Papua serta menuding Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM berat di Papua[13]. Selain itu AS juga menyebutkan tujuannya pengiriman pasukan militer salah satunya ialah untuk melakukan bantuan kemanusiaan, menciptakan misi perdamaian dan membangun situasi damai di kawasan Asia Pasifik[14]. Hal itu kemudian tampak terlihat jelas bahwa adanya keinginan intervensi AS dalam setiap konflik yang terjadi di Asia Pasifik, yang salah satunya konflik yang terjadi di Papua, mengingat jaraknya

---

[12]. BBC Indonesia, *Indonesia-AS Bicarakan Hubungan Militer (online),* 2011, <http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/10/111023_panettaindonesia.shtml>, 8 Oktober 2012.

[13]. West Papua Liberation Organization, *Sejarah OPM (online),* 2011, <http://oppb.webs.com/sejarahopm.htm>, diakses pada 2 Oktober 2012

[14]. Australia Matters for America, *No Hedging in Canberra: The Australia-US Alliance in the "Asian Century" (Online),* 2012, <http://www.australiamattersforamerica.org/2012/04/no-hedging-in canberra-the-australia-usalliance- in-the-asian-century/>, diakses 17 September 2012.

yang sangat dekat dengan Darwin. Sehingga hal tersebut semakin jelas bahwa AS ingin melibatkan dirinya dalam masalah internal Indonesia.

Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia yang sepakat untuk membangun pangkalan militer di Darwin. Berkaitan dengan integrasi nasional Indonesia yang saat ini sedang menghadapi tantangan dengan adanya konflik yang berkepanjangan di Papua yang memunculkan gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari NKRI . Tentunya dengan AS menyebutkan bahwa salah satu tujuan bahwa didirikanya pangkalan militer di Darwin adalah untuk misi kemanusiaan , menciptakan perdamaian dan membangun situasi damai di kawasan Asia Pasifik termasuk di Papua , yang ini akan semakin menambah rumit terhadap apa yang terjadi di Papua. Keinginan AS dan Australia untuk melakukan intervensi di Papua dengan menggunakan isu HAM akan menimbulkan sebuah ancaman yang bersumber dari luar terhadap kedaulatan Indonesia. Dimana ini akan sangat berpengaruh terhadap jalanya kedaulatan di Indonesia apalagi dengan kedekatan jarak antara Darwin dengan Papua yang tentunya akan semakin mudah bagi AS dan Australia untuk melakukan pengawasan perkembangan situasi di Papua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas , ditemukan masalah yang akan menjadi pokok analisis pada skripsi ini, yaitu :

Bagaimana pengaruh negatif (ancaman) pembangunan pangkalan militer di Darwin bagi kedaulatan Indonesia?

D. Kerangka Konseptual

Untuk dapat menjawab dan mendeskripsikan fenomena yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas , maka Penulis *menggunakan konsep kedaulatan* dan *konsep ancaman* dalam permasalahan ini :

1. Konsep Kedaulatan

Salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara adalah pemerintahan yang berdaulat atau kedaulatan. Istilah kedaulatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan berkebangsaan Perancis yang bernama Jeans Bodin (1539-1596). Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Maksutnya adalah Negara yang berdaulat yaitu negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan bentuk kebijaksanaan negara tanpa campur tangan negara lain.

Sedangkan kedaulatan memiliki sifat-sifat pokok yang terdiri dari empat sifat, yaitu:

1. Permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama suatu negara tetap berdiri
2. Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.
3. Bulat, artinya tidak dapat dibagi-bagi karena kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam negara.

4. Tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan itu terbatas, tentu saja kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.[15]

Negara modern adalah negara yang mempunyai kedaulatan. Hal ini untuk independen dalam menghadapi komunitas lain. Selain itu konsep ini menyebutkan tujuan dan maksud sebuah negara yang berdaulat adalah untuk memberikan perlindungan bagi warga negara atau subjek yang patuh terhadap kedaulatan dalam negara. Sehingga jelas disini kedaulatan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh negara yang ingin independen atau merdeka dalam menjalankan kehendak rakyat yang dipimpinnya. Sehingga kedaulatan merupakan hal yang mempengaruhi seluruh kehidupan bernegara.

Didalam konsep ini seperti yang dijelaskan juga oleh Bodin, adanya kedaulatan Internal dan kedaulatan Eksternal. Kedaulatan internal adalah kekuasaan tertinggi di mana negara memiliki batas-batas melebihi batas-batas yang dimiliki oleh warga negara terhadap dirinya sendiri, negara memiliki hak-hak dalam pengambilan keputusan tertinggi,dan di mana negara memiliki hak-hak dalam penegakan kewenangan. Sedangkan, kedaulatan eksternal merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan Internal, dan menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional, setiap negara berada pada posisi kemerdekaan. Asumsi dari kedaulatan eksternal adalah tidak adanya otoritas tertinggi dalam konsep internasional selain negara yang berdaulat itu sendiri[16].

---

15 Gabriella Slomp . *Issues in International Relation 2nd Edition.* Hal. 43

16 Ibid

Kedaulatan sebuah negara tidak terjadi begitu saja, melainkan ada hal-hal yang mempengaruhi kedaulatan sebuah negara. Dengan hal-hal inilah yang menjadikan kedaulatan dapat diperoleh sepenuhnya oleh sebuah negara ataupun dapat terkikisnya kedaulatan negara tersebut. Adapun hal yang dapat mempengaruhi kedaulatan tersebut, diantaranya :

- Pengakuan sejumlah negara lain terhadap Kedaulatan.

Pengakuan merupakan dasar identitas legal suatu negara dalam konteks politik Internasional. Dimana menurut Dr. Mohammed Hafeed Ghanem; Pengakuan terhadap kedaulatan negara atau pemerintahan adalah suatu ikrar dari negara (anggota komunitas internasional) terhadap negara atau pemerintahan baru yang memenuhi unsur terbentuknya negara yang berdaulat dan bermaksud untuk menjalankan hubungan dengan negara tersebut sebagai subyek hukum internasional.[17]

Dalam prakteknya, pengakuan terhadap negara atau pemerintahan baru merupakan aktifitas politik untuk mengakui adanya fakta tentang kedaulatan pemerintahan negara tertentu yang termasuk di dalamnya konsekuensi yang di timbulkan dari pengakuan tersebut. Dengan kondisi seperti ini negara yang mendapatkan pengakuan terhadap kedaulatan yang dimilikinya dianggap telah dewasa untuk menjalankan sesuai kehendak negara berdasarkan kekuasaannya sendiri bukan dari kekuasaan yang lain.

---

[17] Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara, Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 119.

- Kondisi Insugensi

Pada prinsipnya kondisi insurgensi merupakan kondisi dimana ada pemberontakan dalam suatu negara namun secara fakta belum mencapai tingkat keteraturan sebagai organisasi yang terpadu dalam melakukan perlawanan. Jadi kedudukan pemberontak belum dapat diakui sebagai pribadi internasional yang menyandang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.[18]

Dalam kualifikasinya sebagai *insurgents*, pemberontak atau gerakan separatis secara hukum internasional masih dilihat sebagai gerakan yang bertujuan mencapai keberhasilan melalui penggunaan senjata. Jadi kualifikasi insurgensi belum dapat disebut sebagai perang saudara (*civil war*) dalam hukum internasional.

Di wilayah di mana terjadi pemberontakan, pemerintah negara masih memiliki semua hak dan kewajiban sebagai penguasa yang sah. Dalam hubungan ini maka sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) yang dikeluarkan tahun 1965, maka setiap upaya negara asing membantu kaum pemberontak merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional.[19]

Dari uraian diatas, sehingga Indonesia sebagai negara modern yang telah berdaulat sejak tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi telah diakui oleh dunia internasional. Dalam berdaulat Indonesia memiliki wewenang untuk menentukan

---

[18] Ibid

[19] Adji, Samekto . Kasus Aceh, Indonesia Tak Dapat Dituntut . Pdf. Hal. 12

nasibnya sendiri. Diantaranya untuk menjaga kedaulatan, warga negara, serta keamanan nasionalnya terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari luar.

Dalam hubungan internasional negara Indonesia memilki kedaulatan eksternal yang menempatkan Indonesia pada posisi negara kemerdekaan yang menjadi otoritas tertinggi dalam lingkungan pergaulan Internasional dengan negara-negara lain. Sehingga dengan ini Indonesia dalam menjaga kedaulatannya sebagai sebuah negara berhak untuk menentukan nasib negaranya tanpa adanya intervensi dari negara lain.

Dalam pembahasan skripsi ini, dimana kedaulatan yang telah dimiliki oleh Indonesia sejak secara resmi diakui oleh dunia Internasional sejak 17 Agustus 1945. Dalam menjalankan kedaulatan yang telah dimiliki oleh Indonesia, negara dihadapkan pada kondisi yang dapat berpengaruh terhadap terkikisnya kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia. Kondisi ini ialah insurgensi di Papua yang terdapatnya pemberontakan separatisme diwilayah Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI.

Sesuai dengan kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia tentunya masalah di Papua masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Indonesia. Namun pada kenyataannya dalam masalah yang terjadi di Papua adanya keterlibatan oleh pihak lain yaitu AS dan Australia, terkait dengan adanya pembangunan pangkalan militer di Darwin yang sangat dekat dengan Papua. Dimana adanya pangkalan ini selain jaraknya yang sangat dekat dengan Papua yang hanya berjarak 820 km, bahwa tujuan pembangunan pangkalan ini yang mengindikasikan adanya tindakan intervensi di dalam konflik di Papua, serta adanya pangkalan ini yang berpotensi

untuk mempermudah dukungan AS dan Australia terhadap kemerdekaan di Papua.

Dari hal-hal diatas sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2131 (XX) tahun 1965, yang menyebutkan setiap upaya negara asing membantu kaum pemberontak merupakan tindakan intervensi, dan karenanya merupakan pelanggaran hukum internasional. Sehingga dari adanya pembangunan pangkalan militer di Darwin ini yang akan berdampak pada kondisi konflik di Papua yang mengancam kedaulatan Indonesia, bahwa keberadaan pangkalan militer ini merupakan pelanggaran hukum karena dapat mengancam kedaulatan indonesia.

2. Konsep Ancaman

Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa[20]. Dalam kaitannya dengan ancaman terdapat dua cara pendekatan, yaitu ancaman terhadap apa dan ancaman dari apa. Dalam hal ancaman terhadap apa, pada awalnya ditekankan pada "negara". Negara menjadi target dari ancaman; dan karenanya, keamanan negara menjadi paradigma awal dalam memahami keamanan. Fungsi keamanan lebih diberikan pada usaha untuk melindungi negara. Fungsi ini memberikan penekanan pada usaha-usaha untuk melindungi integritas wilayah, keselamatan negara dan kedaulatan negara.

---

[20] UU TNI tahun 2004 pasal 1 ayat 24

Dalam perkembangannya, spektrum "ancaman terhadap" mengalami perluasan hingga menjangkau, keamanan manusia, baik sebagai invidu maupun sebagai kelompok kolektivitas. Perluasan konsep ini tampak dari rumusan yang dikedepankan PBB yang mengharuskan konsep "keamaman terhadap" dirubah dari "penekanan pada keamanan nasional" ke arah penekanan yang lebih besar pada "*people security*".[21]

Sementara mengenai ancaman dari apa, terdapat beberapa cara untuk melihatnya, secara garis besar sumber ancaman terbagi atas dua sumber, yaitu ancaman militer dan ancaman non militer. Umumnya sumber ancaman secara militer yang merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menggangu atau menghambat kedaulatan negara lain dengan menggunakan kekuatan militer yang biasanya ini terjadi dari lingkungan eksternal. Sementara dalam ancaman non militer adalah merupakan penggunaan kekuatan bukan militer yang mampu menghadirkan perasaan terancam oleh negara lain mengenai kedaulatanya.

Namun oleh T. May Rudi menjelaskan dengan klasifikasikan secara mendasar mengenai macam ancaman, diantaranya adalam ancaman Militer, Politik, Sosial, Ekonomi, Ekologi .[22]

1. Militer

Ancaman militer telah menjadi hantu yang paling menakutkan dalam sejarah sebuah bangsa. Tak hanya unsur-unsur vital yang akan hancur, namun pula unsur-unsur ekosistem serta unsur-unsur kehidupan sosial politik akan

---

21 Arnold Wolferes, *Contending theories in International Relations*. Hal 114.

22 T. May Rudi, *Studi Strategis: Dalam transformasi Sistem Internasional pasca perang Dingin, Hal. 33-35*

mengalami akibat yang lebih fatal. Pencegahan ancaman militer sampai saat ini masih merupakan prioritas setiap negara, mengingat tentu saja mereka tidak ingin apa-apa yang telah diraih rakyatnya dalam bidang seni budaya, industri, teknologi serta seluruh aktifitas yang telah ditekuni, musnah karena peperangan.

2. Politik

Ancaman politik lebih mengarah kepada stabilitas organisasi pemerintah. Tujuannya bisa untuk menekan pemerintah yang berkuasa dalam kebijakan yang diambil, menggulingkan pemerintah, atau menciptakan intrik politik yang mampu mengganggu jalannya pemerintahan sehingga pula melemahkan kekuatan militernya. Ancaman politik boleh jadi merupakan ancaman umum yang terdapat di semua bangsa-bangsa didunia, tanpa melihat besar atau kecilnya baik negara maupun kekuatan yang dimilikinya.

3. Sosial

Perbedaan antara ancaman politik dan ancaman sosial yang dapat terjadi disebuah negara adalah sangat tipis. Ancaman sosial biasanya terjadi sebagai imbas dari ancaman militer dan politik , atau dapat pula dari perbedaan kultur. Kendala utama yang dihadapi dalam menghadapi ancaman sosial adalah, bahwasannya ancaman tersebut biasanya datang dari dalam negeri sendiri.

4. Ekonomi

Ancaman ekonomi merupakan ancaman yang paling sulit diatasi dalam kaitannya dengan keamanan nasional. Negara dalam hal ini hanyalah salah satu aktor yang berperan dalam perekonomian dunia. Kelemahan dalam bidang ekonomi, dapat menjadi jalan bagi bangsa asing untuk mengontrol jalannya

pemerintahan melalui bantuan ekonomi. Jika negara tersebut tidak mampu segera bangkit dari aspek struktural tersebut, maka keruntuhan sebuah negara tinggal menunggu waktu.

5. Ekologi

Ancaman ekologi bagi keamanan nasional ibarat ancaman militer dan ekonomi yang dapat menghancurkan bentuk dasar suatu negara. Secara tradisonal, ancaman ekologi dapat dilihat sebagai ketidaksengajaan, bagian dari kehidupan kondisi alam, dan suatu persoalan dari pokok persoalan bagi agenda keamanan nasional.[23]

Sehingga dari penjelasan uraian diatas dapat dilihat dengan adanya pembangunan pangkalan Militer Amerika Serikat yang ada di Darwin, dalam kaitanya dengan kedaulatan negara Indonesia. Bahwa pangkalan militer tersebut dapat mengganggu atau mengancam kedaulatan Indonesia yang dalam hal ini adalah mengenai isu yang terjadi di Papua. Mengingat perhatian besar terhadap Papua yang di berikan oleh Amerika serikat dan Australia menjadikan pangkalan ini bisa dijadikan sebagai sebuah alat untuk menekan Indonesia atau menjadi basis pengawasan terhadap perkembangan situasi di Papua.

Ancaman bagi Indonesia yang bersumber dari luar yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan pangkalan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah Indonesia untuk dapat tetap menjaga apa-apa yang telah dimiliki oleh Indonesia. Keinginan untuk intervensi dari Amerika Serikat dan Australia dalam

---

23 Ibid

masalah internal yang terjadi di Indonesia menjadikan Indonesia untuk lebih waspada.

Selain itu kedekatan jarak antara Darwin dengan wilayah Papua yang hanya berjarak 820 km tentunya menambah ancaman tersendiri bagi Indonesia sebagai negara tetangga di sekitar Darwin. Keterbukaan wilayah Indonesia pada umumnya dan keterbukaan wilayah Papua pada khususnya yang mana secara geografis letak Papua berada di ujung timur perbatasan wilayah Indonesia, kemudian wilayah papua yang terdiri dari daerah yang berbukit, pegunungan, dan hutan semakin membuat wilayah ini sangat terbuka yang nantinya akan berdampak pada kerawanan tindakan negara laian melakukan Infiltrasi asing ke Papua yang selama ini masih bergejolak.

E. Hipotesa

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat dibuat sebuah kesimpulan sementara :

Pembangunan pangkalan militer di Darwin, dengan kedekatan jarak antara Darwin dengan wilayah Indonesia khususnya Papua yang hanya berjarak 820 km dengan Papua akan memberikan ancaman secara politik bagi kedaulatan Indonesia.

F. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis menentukan tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk pengaruh negatif atau ancaman dari tindakan pembangunan pangkalan AS di darwin yang dapat berdampak pada kedaulatan Indonesia terkait masalah separatisme di Papua.
2. Mengaplikasikan Teori-teori yang penulis dapat selama dibangku kuliah sebagai manifestasinya.
3. Tulisan ini didedikasikan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Indonesia harus berhati-hati dan bersifat kritis terhadap pembangunan pangkalan militer AS di Darwin karena dapat mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia.

G. Metode Penulisan

Metode dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deskripsi analisis. Teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah menggunakan pengumpulan data sekunder, yaitu berdasarkan pada data yang telah tersedia, dengan melakukan telaah pustaka pada sejumlah literatur, yang mempunyai relevansi dengan permasalahaan yang diteliti yaitu antara lain :

1. Buku-buku
2. Jurnal
3. Majalah dan surat kabar
4. Artikel-artikel dan data dari internet

H. Jangkauan Penulisan

Fokus obyek penelitian ini dipusatkan mengenai Gambaran umum tentang alasan tindakan AS membangun pangkalan militer di Darwin yang memiliki kedekatan jarak dengan wilayah Indonesia, khususnya Papua. Dengan kedekatan jarak serta tujuan dibangunya pangkalan ini akan meberi pengaruh terhadap kedaulatan Indonesia. Fokus waktu penelitian dimulai sejak terbentuknya NKRI sebagai suatu proses integrasi nasional yang diperoleh Indonesia dari penjajah, dilanjutkan ketika terjadi pertemuan Presiden Barack Obama dengan Perdana Menteri Julia Gillard pada November 2011 sampai saat ini setelah penempatan pertama pasukan Amerika Serikat di Darwin.

I. Sistematika Penulisan

BAB I	Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, Metode Penulisan, Jangkauan Penulisan dan Sistematika Penulisan.
BAB II	Merupakan Bab yang akan berusaha memaparkan mengenai Gambaran umum Integrasi nasional di Indonesia dan Sejarah konflik di Papua.

BAB III	Merupakan Bab yang akan berusaha memaparkan mengenai kebijakan keamanan Amerika Serikat dan Asutralia di Asia Pasifik dengan membangun pangkalan militer Darwin.
BAB IV	Merupakan Bab yang akan menganalisa dari adanya pengaruh atau ancaman pangkalan Darwin bagi kedaulatan Indonesia khusunya wilayah Papua yang masih menjadi tantangan Integrasi nasional Indonesia.
BAB V	Merupakan bab penutup yang akan berusaha memaparkan kesimpulan dari bab sebelumnya.